

**ANALISIS SEMIOTIKA TERKAIT PERAN DAN FUNGSI
PENGAWASAN INTERNAL**

(Studi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat)



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Akuntansi
pada Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

INDRA SARIDEWI RAHMAT

90400116084

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indra Saridewi Rahmat

NIM : 904001156084

Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 09 Februari 1997

Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Analisis Semiotika Terkait Peran dan Fungsi Pengawasan
Internal (Studi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Januari 2021

Penyusun,

Indra Saridewi Rahmat
90400116084



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong - Gowa ■ 424835, Fax. 424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Semiotika Terkait Peran dan Fungsi Pengawasan Internal (Studi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat)”, yang disusun oleh **INDRA SARIDEWI RAHMAT, NIM 90400116084**, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2021 bertepatan dengan 9 Muharam 1443 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Samata-Gowa, 25 Oktober 2021

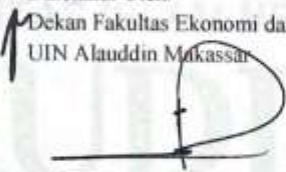
18 Rabiul Awal 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.	()
Sekretaris	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.	()
Penguji I	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.	()
Penguji II	: Sumarlin, SE., M.Ak.	()
Pembimbing I	: Andi Wawo, SE., M.Sc., Ak.	()
Pembimbing II	: Puspita H. Anwar, SE., M.Si., Ak. CA., CPA	()

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hiidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi yang memberi citra kepada manusia tentang bagaimana dan cara beretika sesuai tuntunan wahyu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Analisis Semiotika Terkait Peran dan Funsu Pengawasan Internal (Studi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat)”

Ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga besar terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, ayahanda terkasih Achmad .S dan ibunda tercinta Djumariah Erang yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta. Semoga jasanya dibalas oleh Allah swt. Aamiin.

Skripsi ini dapat tersusun atas bantuan dan perhatian berbagai pihak, yang dengan baik hati bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan informasi serta senantiasa memberikan semangat sehingga konsistensi selalu terjaga selama pengerjaan skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.Ag., Phd, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV UIN Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Memen Suwandi, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu Dr. Lince Bulutoding, S.E., M.Si., Ak.CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Andi Wawo, S.E., M.Sc., Ak selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan waktu luangnya, saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Puspita H. Anwar, S.E., M.Si., Ak.CA., CPA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Segenap Staf Jurusan dan Pegawai Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik selama penulis melakukan studi dan penyelesaian skripsi.
8. Teman-teman Akuntansi B 2016, terima kasih sudah menjadi partner berjuang selama proses perkuliahan hingga semester berakhir.

9. Teman-teman Akuntansi angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas motivasi, keakraban dan persaudaraannya selama penulis menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar.

10. Semua keluarga, sahabat, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan rekan-rekan mahasiswa serta pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga ilmu yang telah didapatkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu 'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Samata-Gowa, Januari 2021

Penyusun,

Indra Saridewi Rahmat
90400116084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. <i>Stewardship Theory</i>	15
B. Konsep Semiotika	16
C. Konsep Pengawasan	20
D. Fungsi Inspektorat – Aparat Pengawas Internal Pemerintah	22
E. Independensi	26
F. Profesionalisme	28
G. Fungsi Inspektorat Provinsi sebagai Pengawas Internal	29
H. Rerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data Penelitian	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Instrumen Penelitian	38
F. Teknik Analisis Data	39
G. Informan Penelitian	40
H. Uji Keabsahan Data	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

1. Visi dan Misi 43
2. Nilai-nilai Luhur 43
3. Tugas Pokok dan Fungsi 45
4. Struktur Organisasi 46

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dari Aspek Sintaktika 47
2. Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dari Aspek Semantika 52
3. Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dari Aspek Pragmatika 60

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 65

- B. Keterbatasan dan Saran Penelitian 66

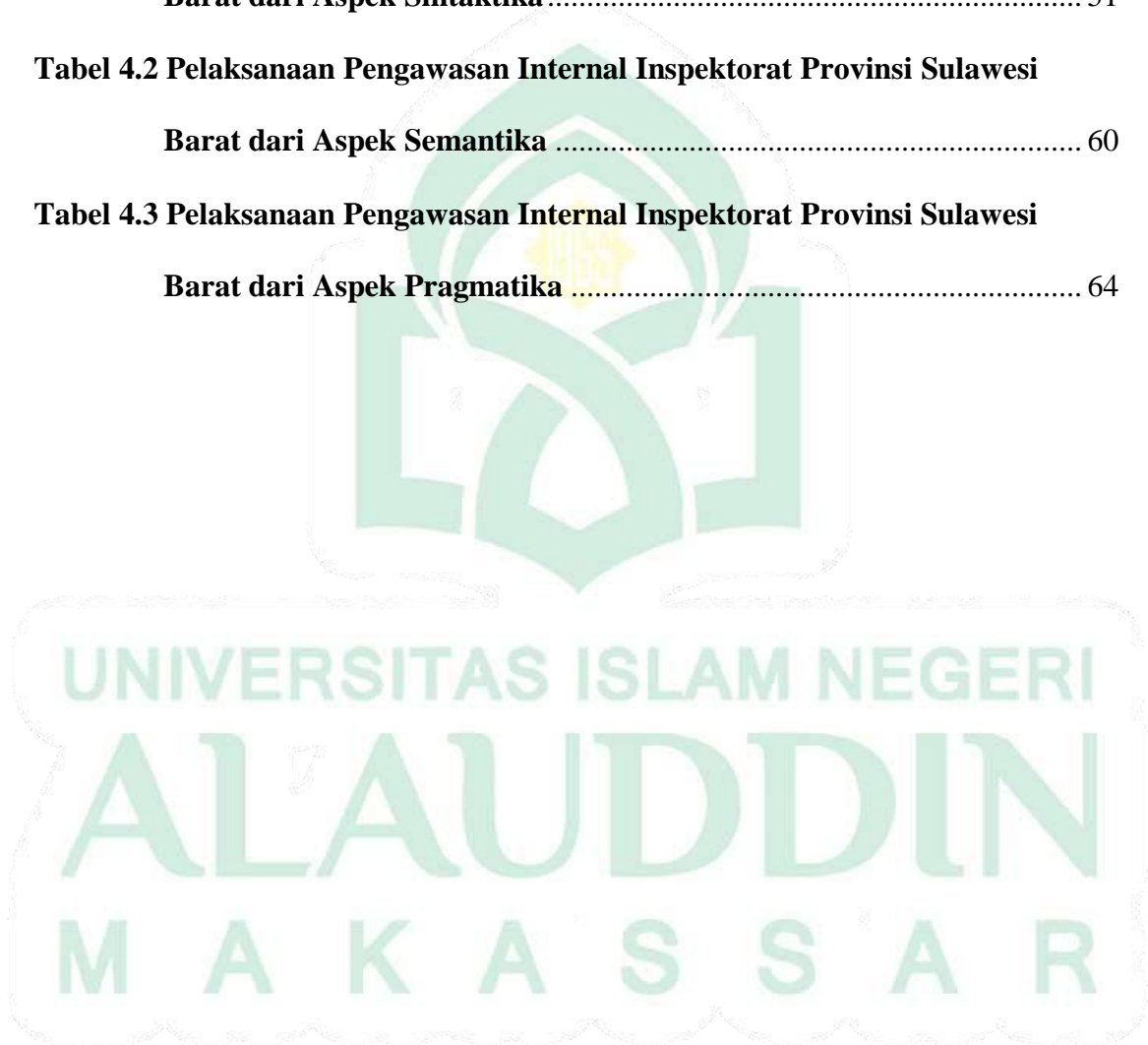
DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Provinsi Sulawesi	
Barat dari Aspek Sintaktika	51
Tabel 4.2 Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Provinsi Sulawesi	
Barat dari Aspek Semantika	60
Tabel 4.3 Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Provinsi Sulawesi	
Barat dari Aspek Pragmatika	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Fikir.....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	46



ABSTRAK

Nama : Indra Saridewi Rahmat
NIM/Jurusan : 90400116084/Akuntansi
Judul : Analisis Semiotika terkait Peran dan Pengawasan Internal (Studi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan internal inspektorat daerah melalui pendekatan semiotika, yaitu dari aspek sintaktika, semantika dan pragmatika.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan semiotika bersifat critical paradigma. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari beberapa informan dan hasil observasi lapangan serta ditunjang dengan data-data lainnya, sedangkan data sekunder di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti jurnal-jurnal yang menjadi pendukung dan bahan rujukan dan bukti atas temuan yang ada pada data primer. Metode pengumpulan data (untuk data primer) ialah peneliti melakukan wawancara secara mendalam, melalui studi pustaka, studi dokumentasi, dan internet search. Selanjutnya untuk menganalisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji keabsahan data dengan menggunakan 3 triangulasi yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber, dan triangulasi teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pandangan aparat pemerintah mengenai fungsi pengawasan internal inspektorat provinsi melalui pendekatan semiotika adalah pandangan mengenai sisi semiotika itu sendiri yaitu: sintaktika, semantika, dan pragmatika. Dari analisis sintaktika dimaknai dengan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dilingkungan Provinsi Sulawesi Barat yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal jalannya program pemerintahan. Dari analisis semantika dimaknai dengan kegiatan fisis Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang terbagi atas dua yaitu berdasarkan simbol fisik dan simbol kata pada standar operasional prosedur pemeriksaan reguler. Selanjutnya dari analisis pragmatik pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa standar operasional prosedur pemeriksaan reguler yang disusun memberikan manfaat bagi para pengguna dalam hal peningkatan kinerja dan pemahaman para aparat pemerintah.

Kata Kunci: *Inspektorat Provinsi, Pengawasan Internal, Semiotika*

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu dipadukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme yang dalam penerapannya adalah membuat suatu tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik (Manossoh, 2015). Otonomi provinsi berguna untuk mengurus kebijakan rumah tangga masing-masing, sehingga dalam praktiknya diperlukan upaya pengawasan internal untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya peningkatan penyelewengan anggaran.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan sebagai jaminan agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syafrizal dkk., 2018). Adanya implementasi dari otonomi provinsi ini merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi. Menurut Sudiran dan Jubaidi (2018) menyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Hakikat pengawasan adalah

mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi (Hamzah dkk., 2018).

Pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan pengawasan, *review*, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Mahanani, 2018). Satuan kerja perangkat provinsi (SKPD) memiliki peran masing-masing dalam membangun SPIP di unit kerjanya dan Inspektoratlah yang akan mengawal dan menilai efektivitas pelaksanaan SPIP tersebut. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan provinsi secara andal, mengamankan aset provinsi dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Manialup dkk., 2017). Menurut Muis (2014) bahwa dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah provinsi dibutuhkan komitmen mulai dari pimpinan dan seluruh pegawai agar bisa mencapai tujuan bersama, sehingga untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik diperlukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang handal, transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan yang ada. Pemerintah provinsi berupaya untuk bisa menjalankan sistem pengendalian intern dengan sebaik mungkin agar bisa mencapai tujuan.

Peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di Indonesia merupakan bagian dari implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, khususnya dalam rangka menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran APIP yang efektif (Arief dkk., 2018). Upaya untuk meningkatkan kinerja APIP yaitu dengan melakukan penilaian kapabilitas APIP, hal ini menjadi salah satu fokus pemerintah untuk segera diatasi. APIP dituntut untuk mampu memberikan nilai tambah dan membantu auditi mengenali resiko-resiko yang akan menghambat perbaikan kinerja audit (Ruhbaniah dkk., 2012).

Inspektorat berperan untuk memastikan penyelenggaraan SPIP dipemerintah provinsi, apakah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan atau pedoman serta melakukan pemantauan secara berkala karena penyelenggaraan SPIP di SKPD merupakan mesin penggerak organisasi (Manialup dkk., 2017). Inspektorat diharapkan tidak menjadi instansi yang selalu mencari kesalahan meskipun kesalahan tersebut sangat kecil yang dapat menyebabkan instansi teknis menjadi tidak nyaman.

Hal ini juga telah dijelaskan dalam Islam, salah satu kebiasaan buruk manusia yang tak ada habisnya adalah mencari kesalahan orang lain. Tak ada yang membayarnya, namun masih banyak yang rela memata-matai tiap kesalahan orang lain. Dan bahkan Allah memisalkan orang yang bersikap seperti itu laksana manusia yang memakan

daging saudaranya yang sudah mati. Jangankan memakan, membayangkan saja sudah menjijikkan. Kalaupun demikian, masih sudikah kita mencari-cari kesalahan orang lain? Dalam QS Al-Hujurat/49: 12 disebutkan:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأَوَسُّجَدَلَا وَمَذْ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”

Dalam tafsiran Al-Misbah karya Quraish Shihab (2011: 143), ayat tersebut dijelaskan sebagai sebuah penegasan untuk senantiasa berprasangka baik (berhusnudzon) kepada sesama karena akan mendatangkan keburukan bagi diri sendiri. Besarnya tingkat kebocoran penggunaan dana yang bersumber dari APBD dan APBN diakibatkan oleh lemahnya pengendalian dan pengawasan internal. Pengawasan di lingkungan pemerintahan dilaksanakan oleh aparat pengawasan ekstern pemerintah, yaitu BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri atas BPKP, Inspektora Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Kementerian/LPND serta Inspektorat Provinsi, Provinsi dan Kota. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah lembaga pengawasan yang banyak tersebut tidak diikuti dengan kinerja yang diharapkan (Haris dan Kusmanto, 2016). Menurut Trisnawati dkk. (2018) bahwa pengawasan internal masih menghadapi kendala di berbagai

pemerintah provinsi di Indonesia. Aparat pengawasan belum cukup berintegritas dan memiliki kapabilitas, maka aparat pengawasan belum benar-benar independen, dan kebutuhan jumlah personel aparat pengawasan belum terpenuhi. Terjadinya penyimpangan yang berulang-ulang dalam bentuk kerugian negara mengakibatkan rendahnya keberhasilan program sehingga efisiensi pelaksanaan kegiatan mengakibatkan tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan, maka dari itu dianggap pengawasan tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal ini, permasalahan juga muncul di Provinsi Sulawesi Barat, dimana pada tahun anggaran 2016 pengawasan yang dilakukan inspektorat dinilai kurang optimal yaitu kurangnya pengawasan terhadap aset provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kelemahan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah provinsi dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku disebabkan karena pelaksana yang bertanggungjawab, lalai dalam tugasnya dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan serta sistem pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hal ini berarti bahwa peran dan fungsi pengawasan intern dan pengawasan ekstern belum dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (Setiawan dan Putro, 2013).

Pertanggungjawaban dan proses pengelolaan keuangan provinsi maupun keuangan negara, hingga kini masih diperbincangkan, baik di dalam lingkup akademik maupun publik serta masyarakat pada umumnya karena negara sebagai sebuah badan hukum publik pada umumnya mempunyai kewajiban-kewajiban yuridis dan administratif dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan serta

pertanggungjawaban keuangan negara (Risambessy, 2009). Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang bermanfaat bagi manajemen untuk pelaksanaan kegiatan operasi manajemen sehari-hari. Belkaoui (2006) menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajer atas sumber daya pemilik. Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu aktivitas yang bersifat teknis agar tujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat itu dapat dicapai. Berkaitan dengan itu, maka perlu adanya komunikasi. Menurut Suwardjono (2005:28) menyatakan bahwa efek komunikasi menjadi sasaran penyampaian gagasan atau informasi dari pengirim kepada penerima. Sistem komunikasi dan efek komunikatif dipelajari dalam tiga bidang kajian, salah satunya yaitu semiotika. Semiotika merupakan bidang kajian yang membahas teori umum tentang tanda-tanda (signs) dan simbol-simbol. Terdapat tiga level semiotika, yaitu: sintaktika, semantika, dan pragmatika. Sintaktika berkaitan dengan studi mengenai tanda itu sendiri secara individual maupun kombinasinya, khususnya analisis yang bersifat deskriptif mengenai tanda dan kombinasinya. Semantika adalah studi mengenai hubungan antara tanda dan signifikasi atau maknanya. Pragmatika adalah studi mengenai hubungan antara tanda dan penggunaannya, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan tanda secara konkrit dalam berbagai peristiwa serta efek atau dampaknya terhadap pengguna.

Berkaitan dengan fungsi Inspektorat Provinsi, secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 pasal 4, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi,

Provinsi memiliki fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan salah satu kewenangannya dalam bidang pengawasan adalah pengadaan barang (Marlaini dkk., 2018). Sehubungan dengan itu, peran Inspektorat Provinsi diperlukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku, khususnya yang ingin melakukan kecurangan dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pribadinya (Ardiyanti dkk., 2016).

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri dari audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Aparat pengawasan internal pemerintah di provinsi adalah Inspektorat Propinsi/Provinsi/Kota yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur/Gubernur/Walikota harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan maupun proses tata kelola pengawasan. Peran inspektorat di provinsi sangat penting dalam hal mengawasi kinerja keuangan pemerintah provinsi yang terbagi pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Provinsi (SKPD) agar tidak terjadi penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan serta pelaksanaan tugas-tugas di SKPD. Dalam rangka sistem pengendalian internal pemerintah, tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya merupakan bagian dari pemantauan pengendalian intern (Hamzah dkk., 2018). Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS SEMIOTIKA TERKAIT PERAN DAN**

FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL (Studi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat)”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun fokus penelitian ini dimaksudkan agar pokok permasalahan dapat dijelaskan secara lebih rinci dan menyeluruh dengan tidak mengabaikan maksud serta tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, fokus utama yang akan dikaji pada penelitian ini membahas mengenai kajian fungsi inspektorat terkait pengawasan internal melalui pendekatan semiotika yang dilakukan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Semiotika merupakan bidang yang membahas teori umum tentang tanda-tanda dan simbol-simbol dalam bidang linguistika. Terdapat tiga tataran (level) semiotika yaitu sintaktika (logika/ kaidah bahasa), semantika (tanda/simbol), dan pragmatika. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam dan observasi kepada informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi melalui pendekatan semiotika tentang bagaimana fungsi Inspektorat provinsi terkait pengawasan internal dari aspek sintaktika, semantika, dan pragmatika.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) provinsi dibutuhkan komitmen mulai dari pimpinan dan seluruh pegawai agar bisa mencapai tujuan bersama dan untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik diperlukan SPIP yang handal, transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan. Adanya implementasi dari otonomi provinsi ini merupakan

salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat provinsi yang berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP dituntut untuk mampu memberikan nilai tambah dan membantu auditi mengenali resiko-resiko yang akan menghambat perbaikan kinerja audit. Pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan pengawasan, *review*, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Peran inspektorat di provinsi sangat penting dalam hal mengawasi kinerja keuangan pemerintah provinsi yang terbagi pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Provinsi (SKPD) agar tidak terjadi penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan serta pelaksanaan tugas-tugas di SKPD. Melalui pendekatan semiotika, Inspektorat provinsi dapat lebih memahami tugas dan fungsinya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dari itu dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah simbolisasi pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat provinsi dari aspek sintaktika?
2. Bagaimanakah konseptualisasi pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat provinsi dari aspek semantika?
3. Bagaimanakah aktualisasi pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat provinsi dari aspek pragmatika?

D. Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka atau penelitian terdahulu pada umumnya berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Dalam hal ini, beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Abdul Haris dan Henri Kusmanto (2016)	Fungsi Pengawasan Inspektorat Provinsi Serdang Bedagai (<i>Inspection Function of Inspectorate of Serdang Bedagai Regency</i>)	Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan sistem pengawasan yang dilihat dari segi pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan sudah berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari segi ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan, serta keakuratan data yang dilaporkan inspektorat provinsi serdang bedagai dengan data yang ada di lapangan
2	Manialup, Nangoi dan Morasa (2017)	Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Kabupaten Kepulauan Taulad	Kesimpulan penelitian ini adalah peran inspektorat dalam pelaksanaan SPIP yaitu dilaam hal kepemimpinan, pengawasan intern, knsultan dan penjaminan mutu. Kendala-kendala yang mempengaruhi peran inspektorat dalam pelaksanaan SPIP di Provinsi Kepulauan Talaud yaitu belum adanya peratiran gubernur dan belum membentuk satuan tugas SPIP, pemahaman SDM akan SPIP masih kurang dan jumlah personil belum memadai, anggaran kegiatan pengawasan kurang memadai, belum ada komitmen bersama dalam melaksanakan SPIP serta penilaian

			risiko dan pemetaan risiko belum optimal karena keterbatasan waktu.
3	Marlaini, Aliamin, dan Mirna Indriani (2018)	Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Paradigma Baru (Studi Kasus pada Salah Satu Inspektorat di Aceh)	Penggunaan metode, pendekatan dan fokus audit di inspektorat saat ini belum secara keseluruhan memenuhi tuntutan paradigma baru bagi peran audit intern yang berfungsi sebagai penjamin mutu (<i>Assurance</i>) dan konsultasi (<i>Consulting</i>)
4	Nurmayani dan Eka Deviani (2018)	Peran Inspektorat Provinsi sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Lampung	Hasil dari penelitian ini adalah inspektorat provinsi provinsi lampung sebagai aparat pengawas internal pemerintah provinsi memiliki peran dalam perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan, dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala provinsi di bidang pengawasan. serta dalam menjalankan tugasnya inspektorat provinsi lampung belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga program pengawasan tidak semuanya dapat ditindaklanjuti.
5	Sudiran dan Ahmad Jubaidi (2018)	Tujuan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Berdasarkan <i>Internal Audit Capability Model</i> untuk Mewujudkan Peran yang Efektif di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur	Kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan kapabilitas APIP adalah terbatasnya SDM pengawasan sesuai kompetensi yang disyaratkan/bersertifikasi, belum memadainya pengembang profesionalisme auditor, belum diberlakukannya mekanisme pemberian penghargaan yang sehat

			dan berpola, belum dilakukan Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) per review intern serta belum memadainya anggaran operasional pengawasan
--	--	--	--

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui simbolisasi pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat provinsi dari aspek sintaktika.
2. Untuk mengetahui konseptualisasi pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat provinsi dari aspek semantika.
3. Untuk mengetahui aktualisasi pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat provinsi dari aspek pragmatika.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai fungsi Inspektorat terkait pengawasan internal, agar pengawasan dapat berjalan secara optimal. Sebagaimana yang diketahui bahwa untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektorat provinsi mempunyai fungsi untuk merencanakan program

pengawasan, perumusan kebijakan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam tugas pengawasan serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan peralatan pemerintah provinsi. Teori yang mendukung penelitian ini ialah *Stewardship Theory*. Teori *stewardship* adalah satu keadaan di mana manajer sebagai *steward* lebih berfokus pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi bukan pada keinginan pribadi (Donaldson dan Davis, 1991). Teori *stewardship* menjelaskan mengenai suatu manajemen yang peduli terhadap tujuan organisasi tersebut dengan membentuk unit audit internal yang dapat memberi nilai tambah dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Dimana melalui pendekatan semiotika, Inspektorat dapat lebih memahami tugas dan fungsinya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui tugas dan fungsi inspektorat dalam merencanakan program pengawasan, perumusan kebijakan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam tugas pengawasan serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan peralatan pemerintah provinsi. Serta dapat meningkatkan upaya dalam mendorong peningkatan efektivitas pengendalian dan tata kelola organisasi.

3. Manfaat Regulasi

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri dari audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Aparat pengawasan internal pemerintah di provinsi adalah Inspektorat Propinsi/Provinsi/Kota yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur/Gubernur/Walikota harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan maupun proses tata kelola pengawasan. Berkaitan dengan fungsi Inspektorat Provinsi, Provinsi/Kota secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 pasal 4, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Provinsi/Kota memiliki fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* adalah satu keadaan di mana manajer sebagai *steward* lebih berfokus pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi bukan pada keinginan pribadi (Donaldson dan Davis, 1991). Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok yang pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu dalam kelompok organisasi. Teori *stewardship* menjelaskan mengenai suatu manajemen yang peduli terhadap tujuan organisasi tersebut dengan membentuk unit audit internal yang dapat memberi nilai tambah dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Aktivitas audit internal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu independensi, profesionalisme, kompetensi, kualitas audit, dan dukungan manajemen.

Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuan, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance (Setianto, 2004). Efektivitas audit internal adalah pencapaian tujuan dan sasaran fungsi audit internal (Dittenhofer, 2001). Tujuan akhir dari fungsi audit internal adalah penciptaan nilai tambah bagi organisasi (Mihret dan Yismaw, 2007). Fungsi audit internal yang efektif bertujuan untuk mencapai tujuan utamanya, yang terdiri dari menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi (Huong, 2018). Independensi adalah

bebas dari situasi yang mengancam obyektivitasnya. Obyektivitas merupakan sikap mental yang tidak memihak yang memungkinkan auditor internal melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan yang jujur atas hasil kerja mereka tanpa kompromi dalam kualitas. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi (Setianto, 2004).

B. Konsep Semiotika

Pada masa filsafat Yunani dua ribu tahun yang lalu sudah memikirkan fungsi tanda-tanda dan pada abad pertengahan pengertian serta penggunaan tanda sudah disinggung-singung. Istilah semiotika baru digunakan pada abad 18 yang dicetuskan oleh ahli filsafat kelahiran Jerman bernama Lambert (Zoes, 1991). Istilah semiotika kemudian banyak dibahas secara panjang lebar dan sistematis pada abad 19 oleh beberapa tokoh seperti Roland Barthes, Julia Kristeva, Umberto Eco, Charles Sanders Pierce dan Ferdinand Saussure. Kelahiran semiotika modern mengenal dua tokoh besar dalam penggagas semiotika yaitu Charles Sanders Pierce dan Ferdinand Saussure. Menurut Zoes (1991) menyatakan kedua tokoh tersebut hidup satu zaman namun tidak saling mengenal. Pierce yang memiliki latar belakang ahli logika dan Saussure berlatar belakang linguistik. Memunculkan perbedaan dalam penggunaan istilah. Pierce menggunakan istilah semiotika dan Saussure menggunakan istilah semiologi. Tidak ada perbedaan yang esensial terhadap kedua istilah ini, yang berbeda hanya mengacu pada orientasi pengguna istilah yaitu kubu Pierce dan kubu

Saussure. Istilah semiotika lebih populer digunakan oleh banyak pemikir termasuk kubu dari pemikiran Saussure.

Dalam teori komunikasi, semiotik menjadi salah satu kajian yang menjadi tradisi. Tradisi semiotik terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri (Littlejohn, 2009:53). Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti (Kriyantono, 2007:261). Suwardjono (2005) mengartikan semiotika sebagai suatu bidang kajian yang membahas teori umum tentang tanda-tanda (*signs*) dan simbol-simbol dalam bidang linguistika. Dapat disimpulkan bahwa semiotika adalah studi tentang tanda-tanda. Konsep tanda ini untuk melihat bahwa makna muncul ketika ada hubungan atau hubungan antara yang ditandai dan tanda.

Akuntansi keuangan yang dikenal luas sekarang ini dikembangkan atau direkayasa atas dasar premis bahwa investor dan kreditor adalah pihak yang dituju informasi. Efek komunikasi yang ingin dicapai adalah agar pihak yang dituju tersebut bersedia menanamkan dana ke kegiatan ekonomik yang dibutuhkan masyarakat melalui perusahaan. Pesan tersebut disampaikan melalui medium statemen keuangan (Suwardjono, 2005). Dalam ilmu bahasa, sistem komunikasi dan efek komunikatif dipelajari dalam tiga bidang, yaitu semiotika, linguistika, dan logika. Semiotika merupakan bidang yang membahas teori umum tentang tanda-tanda dan simbol-simbol dalam bidang linguistika. Linguistika itu merupakan bidang ilmu bahasa yang membahas fonetik, gramatika, morfologi, dan makna kata atau ungkapan. Logika

membahas masalah yang berkaitan dengan validitas penalaran dan penyimpulan. Ketiga bidang ini menjadi teori yang melandasi terciptanya komunikasi yang efektif. Terdapat tiga tataran (level) semiotika yaitu sintaktika, semantika, dan pragmatika.

Sintaktika menelaah logika dan kaidah bahasa, yaitu hubungan logis di antara tanda-tanda atau simbol-simbol bahasa (Oktaviani dkk., 2017). Simbol-simbol tersebut (misalnya aset, utang, pendapatan, dan lainnya) harus berkaitan secara logis sehingga informasi semantik dapat dikandung dalam statemen keuangan. Teori sintaktika meliputi pula hubungan antara unsur-unsur yang membentuk struktur pelaporan keuangan atau struktur akuntansi dalam suatu negara yaitu manajemen, entitas pelapor (pelaporan), pemakai informasi, sistem akuntansi, dan pedoman penyusunan pelaporan). Dengan kata lain, dari segi sintaktik, berusaha untuk memberi penjelasan dan penalaran yang melandasi suatu struktur pelaporan keuangan (Suwardjono, 2005). Sintaktika dalam penelitian ini membahas pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat provinsi yang memaknai pengawasan dari segi praktisnya saja.

Semantika menelaah hubungan antara tanda atau simbol dan dunia kenyataan (fakta) yang disimbolkannya (Oktaviani dkk., 2017). Teori ini berusaha untuk menjawab apakah elemen-elemen statemen keuangan benar-benar merepresentasi apa yang memang dimaksudkan dan untuk meyakinkan bahwa makna yang terkandung dalam simbol pelaporan tidak disalahartikan oleh pemakai. Jadi, teori semantik berkepentingan dengan perlambangan dan penafsiran objek akuntansi untuk menghasilkan informasi semantik yang bermakna bagi pemakai laporan (Suwardjono,

2005). Semantika dalam penelitian ini memaknai pelaksanaan pengawasan internal dengan realitas yang terjadi pada Inspektorat provinsi dari segi standar operasional prosedur pemeriksaan reguler. Pragmatika membahas dan menguji apakah komunikasi efektif dengan mempelajari ada tidaknya perubahan perilaku penerima (Oktaviani dkk., 2017). Teori pragmatik membahas berbagai hal dan masalah yang berkaitan dengan pengujian kebermanfaatan informasi baik dalam konteks pelaporan keuangan eksternal maupun manajerial (Suwardjono, 2005). Pragmatika dimaknai dengan efek yang ditimbulkan terhadap pengguna.

C. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi manajemen. Konsep mengenai fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Beliau menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan penilaian (Siagian, 2005). Namun, dalam penelitian ini hanya berfokus pada fungsi pengawasan. Henry Fayol dalam bukunya "*General and Industrial Administration*" menyatakan pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, pengawasan mempunyai kewenangan yang lebih "*forcefull*" terhadap objek yang dikendalikan, atau objek yang diawasi. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan konkrit itu sudah

terkandung didalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif merupakan proses kelanjutan (Subroto, 2009).

Pelaksanaan pengawasan yang efektif merupakan salah satu refleksi dari efektivitas manajerial seorang pemimpin. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa setiap orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer paling rendah hingga pada manajer puncak, selalu menginginkan agar baginya tersedia suatu sistem informasi yang andal agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya benar-benar terlaksana sesuai dengan hal-hal yang telah ditetapkan dalam rencana. Dilihat dari segi pengawasan, sebagian besar kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai satuan kerja penunjang dalam organisasi sebenarnya dilakukan dalam rangka penyediaan informasi, seperti informasi keuangan, informasi kepegawaian, informasi logistik, dan informasi ketatausahaan, sebagai bahan untuk memperlancar jalannya pengawasan (Siagian 2005). Menurut Siagian (2005) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, sebuah informasi bukan saja harus dapat dipercaya, mutakhir, dan terolah dengan rapi, tetapi sesuai dengan kebutuhan pemakainya agar benar-benar bermanfaat dan penyediaan informasi berjalan lancar. Artinya, informasi yang bersifat umum memang tetap ada manfaatnya, akan tetapi informasi yang spesifik disediakan untuk kepentingan pengawasanlah yang akan lebih bermanfaat dalam usaha meningkatkan seluruh kegiatan pengawasan yang akan dijalankan.

D. Inspektorat – Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Penyelenggaraan pengawasan merupakan implementasi kebijakan di bidang pengawasan. Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan, tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Hal lain yang juga penting dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu. Fungsi Inspektorat ialah melakukan pengawasan dan audit keuangan pada setiap kegiatan operasional lembaga pemerintah (Umar dkk., 2018). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengawasan itu sendiri (Marlaini dan Indriani, 2018). Menurut Lusiana dkk. (2017) bahwa fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting baik sebagai *early warning system* apabila terdapat penyimpangan maupun sebagai fungsi pembinaan bagi satuan kerja di setiap unit pemerintahan. Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas suatu organisasi (Hamzah dkk., 2018).

Inspektorat provinsi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat penting dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta

program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Provinsi menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam APBD (Nurmayani dan Deviani, 2018). Menurut Hamzah (2018) bahwa peran Inspektorat di provinsi sangat penting dalam hal mengawasi kinerja keuangan pemerintah provinsi yang terbagi pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Provinsi (SKPD) agar tidak terjadi penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan serta pelaksanaan tugas-tugas di SKPD.

Pengawasan intern pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang terdiri dari audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit aparat pengawasan intern pemerintah harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan maupun proses bisnis/tata kelola pengawasan. Kapabilitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang (Sudiran dan Jubaidi, 2018). Menurut Amir (2011:86) menjelaskan bahwa kapabilitas ialah kemampuan mengeksplotasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktifitas. Sesuai dengan ajaran islam yang menjelaskan bahwa pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan

kesadaran dan pengetahuan yang memadai. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra'/17: 36, disebutkan:

وَلَا تَقْفُ مَا يَخْفَىٰ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُمْ مَأْثُورًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

Shihab (2011: 175) dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwasanya segala sesuatu harus dilandasi dengan pengetahuan yang memadai sehingga kita dapat lebih mengimani kekuasaan Allah yang dibalik semua hal yang akan atau sedang dilakukan. Dalam artian hal pengetahuan akan meningkatkan kapabilitas aparatur secara signifikan. Selain kapabilitas, aparatur inspektorat juga memiliki sikap profesionalisme agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Profesionalisme adalah perilaku bertanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang terhadap apa yang telah dikerjakan (Setiawan, 2018). Secara ideal, islam sangat mendorong tumbuhnya sikap profesionalisme, baik dalam kerja untuk orientasi duniawimaupun ukhrawi. Amal perbuatan harus dilakukan seoptimal mungkin (sebagai amal shalih) di dunia maupun amal perbuatan untuk tujuan akhirat. Semuanya itu merupakan ibadah kepada Allah, maka profesionalisme adalah pelaksanaan suatu amal atau pekerjaan dengan kualitas kerja yang tinggi dengan mutu produktivitas yang tinggi pula. Sesuai hadits Rasulullah SAW. banyak yang mengarahkan manusia agar mengarah kepada profesionalisme sesuai dengan pengarahan dan bimbingan dari Al-Quran seperti yang disebutkan diatas, diantaranya:

عَنْ عَشَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ تَعَالَى
إِذَا عَمَلٌ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ نَهَيْتَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Terjemanya:

Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Inspektorat yang merupakan lembaga perangkat provinsi yang mempunyai tugas membantu kepala provinsi (gubernur) dalam menyelenggarakan pemerintahan provinsi dibidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintahan, yang secara organisator dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada kepala provinsi (gubernur). Inspektorat provinsi melakukan, pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Provinsi (SKPD) yang dimana SKPD itu sendiri terkadang masih belum bekerja secara maksimal sebagaimana mestinya (Nurmayani dan Deviani, 2018). Kedudukan Inspektorat provinsi yang demikian, maka independensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasannya akan sulit dilakukan (Setiawan dan Putro, 2013). Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut inspektorat provinsi mempunyai fungsi untuk merencanakan program pengawasan, perumusan kebijakan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam tugas pengawasan serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan peralatan pemerintah provinsi (Haris dan Kusmanto, 2016).

Guna memastikan berjalannya tugas pokok ini, maka dibentuk suatu aturan terkait profesionalisme yang kemudian kita kenal dengan kode etik (Ayem dan Jehadi, 2019). Kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008. Mengacu pada peraturan tersebut, kode etik APIP wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Kode etik APIP terdiri dari dua komponen yaitu prinsip-prinsip perilaku auditor dan aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor.

E. Independensi

Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya (Agusti dan Pertiwi, 2013). Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi dan Puradireja, 2002:26). Dalam Dewan Standard Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui SPAP (2001:220.1) menyatakan bahwa: “auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan didalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk

mempertahankan kebebasan pendapatnya.” Unsur-unsur mengenai independensi adalah suatu sikap mental yang terdapat pada akuntan publik yang jujur, tidak memihak pada suatu kepentingan tertentu dengan keahlian mengenai objek yang diperiksanya, yang memungkinkan ia bersikap jujur, bertindak bebas dari pengaruh, bujukan, pengendalian pihak lain dalam melakukan perencanaan, pemeriksaan dan pelaporannya yang berdasarkan bukti yang ada dari temuan-temuannya. Sehingga mutlak bagi seorang auditor untuk tetap bersikap independen dalam semua hal yang berkaitan dengan tugas mengaudit laporan keuangan (Jesika dkk., 2015).

Seorang auditor yang mempertahankan independensi tidak akan terpengaruh dan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaannya (Rofingatun, 2018). Dalam melaksanakan sikap independennya seorang auditor tidak hanya melaksanakannya dalam pekerjaan lapangan semata melainkan juga dalam mengatur perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan dalam proses audit tersebut (Haryanto, 2018). Semakin independen seorang auditor maka semakin baik kualitas audit. Oleh karena itu, ia tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimilikinya, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat diperlukan untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Menurut Sawyer's (2012) menyatakan bahwa aktivitas audit internal akan tetap bebas dari campur tangan setiap elemen dalam organisasi, termasuk hal-hal seleksi audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, atau isi laporan untuk mengizinkan pemeliharaan sikap mental yang

diperlukan independen dan obyektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi internal auditor, yaitu: konflik peran, ambiguitas peran, status organisasi, dukungan manajemen, dan praktek penggunaan fungsi internal audit sebagai batu loncatan bagi karir masa depan (Haryanto dan Susilowati, 2018).

F. Profesionalisme

Profesionalisme dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar pekerjaan yang berlaku. Profesionalisme Auditor Internal merupakan sikap dan juga perilaku dari auditor itu sendiri dalam melaksanakan profesinya dengan kesungguhan dan juga tanggung jawab agar dapat mencapai kinerjanya dengan baik (Haryanto dan Susilawati, 2018). Apabila seorang auditor tidak memiliki atau telah kehilangan sikap profesionalismenya sebagai seorang auditor maka sudah dapat diyakini bahwa auditor tersebut tidak akan dapat menghasilkan hasil kinerja yang memuaskan dan dengan baik, maka dengan begitu kepercayaan dari masyarakat akan hilang begitu saja terhadap auditor tersebut. Oleh sebab itu sangatlah diperlukan sikap profesionalisme tersebut dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu (Wulandari dan Suputra, 2018). Profesionalisme merupakan sikap bertanggungjawab terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya. Profesionalisme adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar dari memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar dari memenuhi Undang–Undang dan peraturan masyarakat (Susilo dan Widyastuti, 2015).

Sikap profesionalisme akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang dimilikinya yaitu berdasarkan yang pertama pengabdian pada profesi, auditor yang mengabdikan kepada profesinya akan melakukan totalitas kerja dimana dengan totalitas ini dia akan lebih hati-hati dan bijaksana dalam melakukan audit sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Jadi apabila semakin tinggi pengabdian pada profesi akan semakin tinggi profesionalisme auditor (Agusti dan Pertiwi, 2013). Seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Seorang auditor yang memiliki sikap profesionalisme dapat dipercaya dan diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat berjalan lancar, baik dan mendatangkan hasil yang diharapkan (Wulandari dan Suputra, 2018).

G. Fungsi Inspektorat Provinsi sebagai Pengawas Internal

Pengawasan Intern Pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan maupun proses bisnis/tata kelola pengawasan (Sudirman dan Jubaidi, 2018). Pengawasan intern dalam hal ini Inspektorat, dituntut untuk lebih meningkatkan dan berperan aktif dalam hal mengawasi kinerja keuangan SKPD. (Hamzah dkk., 2018). Adapun

menurut Umar dkk. (2018) menyatakan bahwa fungsi Inspektorat ialah melakukan pengawasan dan audit keuangan pada setiap kegiatan operasional lembaga pemerintah. Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas suatu organisasi (Mahanani, 2018). Pengawasan berbasis pada standar kinerja dan perencanaan karena perencanaan dan standar kinerja inilah yang menjadi pedoman untuk melaksanakan pengawasan (Trisnawati dkk., 2018).

Para aparatur inspektorat atau dapat juga dikatakan sebagai auditor internal tersebut harus mengevaluasi berbagai alternatif informasi untuk memenuhi standar lapangan yaitu bukti audit yang kompeten melalui inspeksi, pengamatan, ataupun jenis pemeriksaan lainnya sesuai dengan standar pemeriksaan yang baku (Dewa dkk., 2015). Inspektorat sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk menjadi auditor internal dalam pemerintahan provinsi harus memiliki kompleksitas keahlian yang baik sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Namun dalam praktiknya, kompetensi dan etika profesionalisme yang harusnya ditonjolkan oleh para aparat inspektorat sering akan berbenturan dengan berbagai kepentingan baik itu dengan SKPD yang diawasi dan diperiksa maupun kepentingan-kepentingan lain dari oknum pejabat pemerintahan yang tidak bertanggungjawab, sehingga pada akhirnya kualitas audit yang dihasilkan lagi-lagi tidak maksimal (Abdul dkk., 2016).

Pengendalian internal dilakukan untuk melindungi kekayaan organisasi dengan cara meminimalisasi penyimpangan dan pemborosan serta memaksimalkan

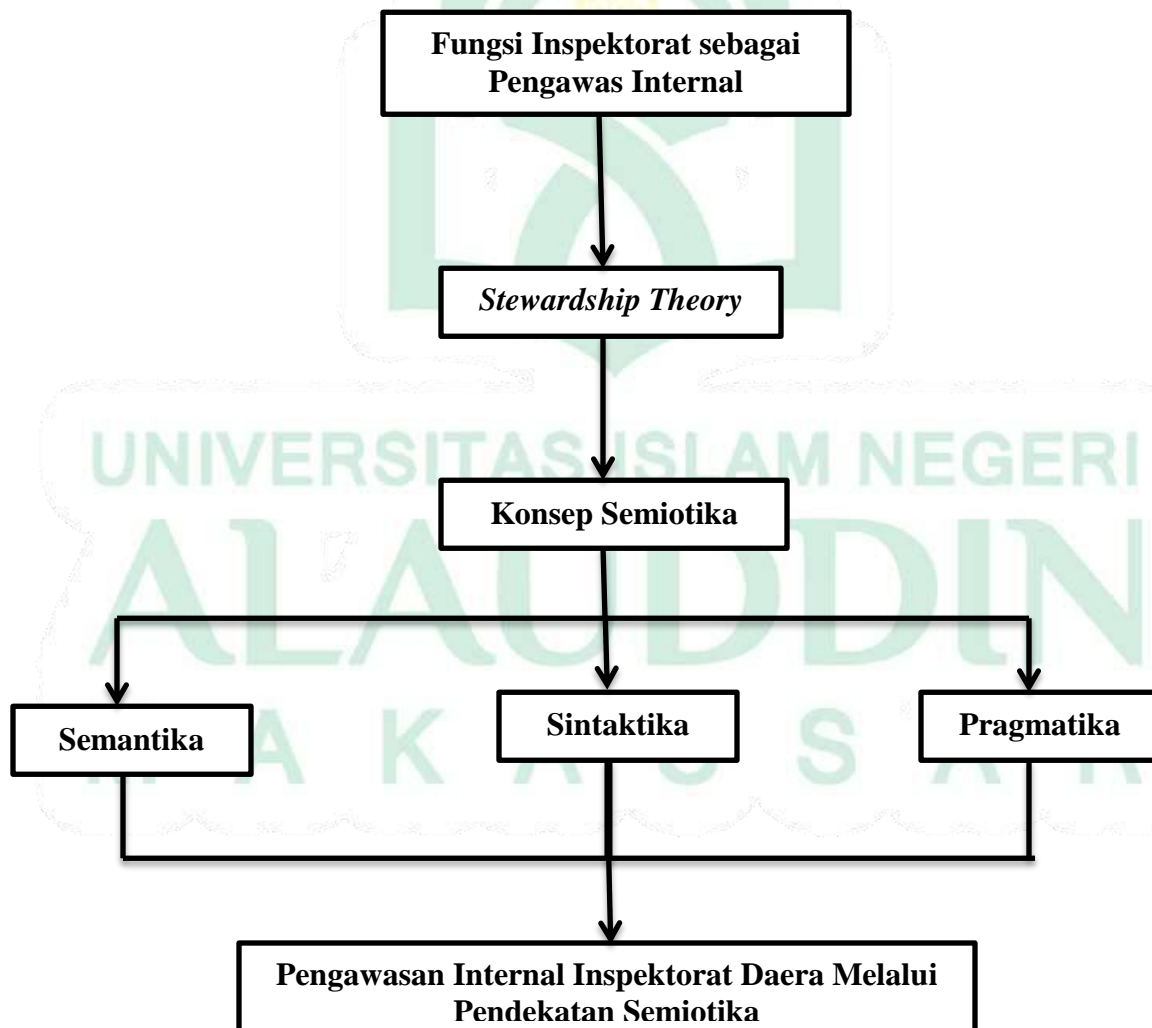
efisiensi, ekonomis serta efektivitas kinerja organisasi atau instansi pemerintah (Sihite dan Holiawati, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan UU No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adanya aturan ini maka pemerintahan pusat atau provinsi dituntut untuk dapat mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan provinsi. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan, penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang ada (Sihite dan Holiawati, 2017).

H. Rerangka Pikir

Penyelenggaraan pengawasan merupakan implementasi kebijakan di bidang pengawasan. Fungsi Inspektorat ialah untuk merencanakan program pengawasan, perumusan kebijakan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam tugas pengawasan serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan peralatan pemerintah provinsi. Adanya implementasi dari otonomi provinsi ini merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi. Pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan pengawasan, *review*, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu kegiatan telah

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Melalui pendekatan semiotika, Inspektorat dapat lebih memahami dan mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan rerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Rerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bungin (2009:68) bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakteristik, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Fokus dari penelitian kualitatif adalah menjelaskan bagaimana gejala sosial dibentuk dan diberi makna. Rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian atau pokok permasalahan yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi (Abdullah, 2015). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena ingin menggali informasi dari para informan secara mendalam tentang pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat provinsi menggunakan pendekatan semiotika.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang beralamat di Empoang, Binamu Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan 92311, Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika. Metode semiotika pada dasarnya bersifat *critical paradigm* dalam melihat fenomena. Dipilihnya paradigma *critical* dalam akuntansi menurut Suwardjono (2005) adalah karena mempunyai tujuan ganda, yaitu memahami suatu praktik dimana ia diterapkan dan sekaligus berusaha untuk menemukan suatu pemecahan ke arah penyempurnaan praktik itu sendiri. Semiotika merupakan bidang kajian yang membahas teori umum tentang tanda-tanda (signs) dan simbol-simbol dalam bidang linguistika. Dalam semiotika terdapat tiga tataran (level) yaitu sintaktika, semantika dan pragmatika. Sintaktika menelaah logika dan kaidah bahasa. Semantika menelaah hubungan antara tanda atau simbol dan dunia kenyataan (fakta) yang disimbolkannya. Pragmatika membahas dan menguji apakah komunikasi efektif dengan mempelajari ada tidaknya perubahan perilaku penerima (Suwardjono, 2005:29). Sebagaimana dalam penelitian ini menginterpretasi apa yang dipahami aparaturnya pemerintah tentang fungsi inspektorat terkait pengawasan internal, yang di mana untuk mengklasifikasikan implementasinya pada aparaturnya pemerintah maka dibutuhkan pedoman dalam

pemaknaan melalui pendekatan semiotika yang berhubungan dengan fungsi Inspektorat terkait pengawasan internal.

C. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk informasi, gambaran umum instansi atau organisasi, pelaksanaan dan informasi lain yang digunakan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah para aparatur pemerintah yang bersangkutan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan aparatur pemerintah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, data lain yang ditemukan langsung oleh peneliti di lokasi, seperti dokumentasi berupa foto.
2. Data Sekunder, yaitu data yang telah ada dan tersedia, berupa data atau dokumen di luar data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal dan sumber lain yang berhubungan erat dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh mengenai sejarah dan struktur organisasi atau gambaran umum instansi, standar operasional prosedur penelitian dan teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data

yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2014:231). Wawancara yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan informan yang menjawab pertanyaan secara langsung. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai objek penelitian (Sugiyono, 2005:240). Dokumentasi bermanfaat sebagai penyedia data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data ini juga berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen atau berupa program-program yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, PSAP dan perundang-undangan

terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

4. *Internet Search*

Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang fungsi inspektorat sebagai pengawas internal. Adapun instrumen penelitian yang digunakan berupa alat penunjang yang dapat mengukur ataupun menggambarkan fenomena yang diamati. Adapun alat yang dapat digunakan dalam instrumen penelitian yaitu:

1. *Handphone*
2. Laptop
3. Alat Tulis
4. Buku Catatan
5. Daftar Pertanyaan Wawancara
6. Buku, Jurnal, dan referensi lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan selama penelitian berlangsung. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.

2. Penyajian data

Langkah kedua adalah penyajian data yang digambarkan dengan sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Diawali dengan menjelaskan rumusan

masalah dengan persepsi penulis sebagai pengantar untuk menyinggung persepsi informan mengenai pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang diperoleh yang berhubungan dengan rumusan masalah dijelaskan terlebih dahulu kemudian menghubungkannya dengan teori untuk bisa menjawab rumusan masalah.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis yaitu penarikan dan verifikasi kesimpulan atas data yang dianalisis agar lebih rinci. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

G. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam desain penelitian ini, peneliti melakukan suatu penelitian dengan pendekatan semiotika melalui paradigma interpretif. Paradigma interpretif merupakan paradigma yang lebih menekankan makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol. Semiotika merupakan bidang kajian yang membahas teori umum tentang tanda-tanda (signs) dan simbol-simbol dalam bidang linguistika. Dalam semiotika terdapat tiga tataran (level) yaitu sintaktika, semantika dan pragmatika.

Subjek penelitian merupakan suatu benda, manusia, maupun lembaga yang akan diteliti dimana di dalam dirinya mengandung hal-hal terkait masalah yang akan

diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian merupakan keseluruhan objek yang terdapat beberapa narasumber atau informan yang nantinya akan memberikan informasi tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam buku Metode Penelitian Ilmu Sosial, informan sebagai orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti, yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Inspektur Provinsi
2. Inspektur Pembantu Wilayah
3. Pejabat Fungsional Auditor

H. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data maka digunakan metode triangulasi data. Triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk menguji derajat kepercayaan. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Paranoan, 2015). Triangulasi meliputi empat hal, yaitu: triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Namun, peneliti hanya menggunakan tiga dari empat jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode dokumentasi dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian.

2. Triangulasi sumber data

Berarti menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain melalui sumber data utama yaitu wawancara, peneliti bisa menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti dokumen yang ditunjukkan informan sebagai bukti sehingga data/keterangan dari informan lebih akurat.

3. Triangulasi teori

Merupakan hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan. Triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman apabila peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambatan Umum Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

1. Visi dan Misi

Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Provinsi. (Pergub Sulbar nomor 46 Tahun 2016)

VISI

Terwujudnya Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yang maju dan malaqbi melalui pengawasan Internal yang *profesional*.

MISI

- 1) Mendorong Peningkatan Kapabilitas APIP.
- 2) Mendorong Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 3) Mendorong penguatan peran Inspektorat sebagai *Quality Assuranse*.

2. Nilai-nilai Luhur

Nilai adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap / perilaku. Berikut ini adalah nilai-nilai yang ditanamkan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat:

1. I : Independen
2. N : Netral
3. S : Sportif
4. P : Profesional
5. E : Efektif
6. K : Kompeten
7. T : Teliti
8. O : Obyektif
9. R : Responsif
10. A : Akuntabel
11. T : Terpercaya

Independen artinya bebas dan hanya tunduk pada yang benar secara hukum

Netral artinya tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak)

Sportif artinya bersifat kesatria, jujur, dan sebagainya.

Profesional artinya bekerja sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

Efektif artinya dapat mencapai tujuan yang maksimal dari yang diharapkan

Kompeten artinya ketrampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik

Teliti artinya mengerjakan sesuatu dengan penuh perhatian, cermat dan hati-hati

Obyektif artinya mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi

Responsif artinya cepat (suka) merespons; bersifat menanggapi; tergugah hati
bersifat memberi tanggapan (tidak masa bodoh)

Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku

Terpercaya artinya paling dipercaya

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Provinsi dan Badan Provinsi Provinsi Sulawesi Barat (Berita Provinsi Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46):

- 1) Inspektorat mempunyai tugas pokok tugas membantu gubernur dalam
membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Provinsi.
- 2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;
 - b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
- d) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) pelaksanaan administrasi inspektorat Provinsi provinsi; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat



Sumber:<https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/wpcontent/uploads/2020/09/struktur-ogr.jpg>

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dari Aspek sintaktika

Unsur pengawas pada kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan kementerian ialah Inspektorat jenderal. Inspektorat jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri (Nurmayani dan Deviani, 2018). Badan pengawasan provinsi disebut inspektorat provinsi. Inspektorat provinsi merupakan unsur pengawasan provinsi yang dipimpin oleh inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala pemerintah (gubernur). Penyelenggaraan pemerintahan provinsi lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan provinsi telah sesuai dengan yang direncanakan, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Badan pengawasan provinsi merupakan instansi dari badan pengawasan yang ditugaskan di provinsi sebagai pengawas umum. Perlu adanya mekanisme kerja dalam melakukan pengawasan baik itu tugas-tugas secara administratif maupun secara operasional.

Peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di Indonesia merupakan bagian dari implementasi sistem pengendalian intern pemerintah,

khususnya dalam rangka menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif. Inspektorat provinsi sebagai APIP memiliki peran untuk memastikan penyelenggaraan SPIP dipemerintah provinsi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan atau pedoman serta melakukan pemantauan secara berkala. Fungsi dan peran kantor Inspektorat adalah perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan administrasi, penyusunan laporan hasil pengawasan, pengelolaan barang milik, pengawasan atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh gubernur, serta penyampaian laporan hasil pengawasan, evaluasi, saran dan pertimbangan kepada gubernur. Salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi dilingkungan Provinsi Sulawesi Barat adalah Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Hasil wawancara dengan Inspektur (Kepala Dinas) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat;

“Di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari *Three Line of Defense*. Pertama, manajemen. Kita harus bisa memastikan bahwa manajemen seperti dinas-dinas itu dengan memberikan mereka ruang-ruang konsultasi jika mereka punya keraguan atau ketidaktahuan terhadap akuntabilitas dari kegiatan yang mereka lakukan. Kedua, dibagian kepemimpinan atau dalam hal ini kepala-kepala dinas atau kepala bidang. Ketiga, ketika kedua pertahanan tadi masih bisa ditembus nah barulah di situ auditor inspektorat beraksi. Jadi peranan Inspektorat di sini adalah memastikan bahwa *quality assurance* dapat tercapai. Di sini kita memainkan peranan deteksi terhadap segala bentuk resiko dari penyelenggaraan pemerintahan.”

Pernyataan yang kurang lebih sama juga dituturkan oleh Inspektur Pembantu

Wilayah Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat:

“Fungsi inspektorat provinsi sesuai dengan surat keputusan Gubernur adalah badan pengawasan internal yang berperan sebagai pembina dan pengawas terhadap seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan di Sulawesi Barat. Selain itu inspektorat provinsi ini juga berperan sebagai lembaga penjamin mutu (quality assurance) terhadap semua SKPD agar semua kegiatan-kegiatan dapat dilakukan sesuai aturan. Di sini kami juga lebih berperan untuk mencegah atau meminimalisir berbagai penyimpangan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan inspektur provinsi dan inspektur pembantu wilayah, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) diberi tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi, agar dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif serta ekonomis (Safwan dkk., 2019). Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menambahkan:

“Tentunya tujuan pengawasan itu sendiri untuk menghindari dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi terhadap pelaksanaan program-program pemerintahan baik dalam tingkatan SKPD, Provinsi, kecamatan, kelurahan maupun desa.”

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan, kontrol atau pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu upaya atau tindakan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan. Inspektorat sebagai APIP di provinsi dituntut memainkan peran untuk mengontrol dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Agar arah dan sasaran pelaksanaan otonomi provinsi dapat terwujud sebagaimana mestinya (Safwan dkk., 2019).

Peran Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sebagai pengawas internal dilingkungan Provinsi Sulawesi Barat memiliki kepentingan untuk menyampaikan suatu informasi terhadap pengguna. Informasi tersebut mencakup simbol-simbol yang diungkapkan dengan bahasa yang tepat. Semiotika merupakan salah satu bidang kajian yang membahas teori mengenai tanda atau simbol dalam bidang bahasa. Simbol atau tanda pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam kegiatan pengawasan bisa didapatkan dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler. Dimana terdapat tiga tahap dalam standar tersebut, yaitu: persiapan dan perencanaan; pelaksanaan penugasan dan pemeriksaan; serta pelaporan hasil penugasan. Pada tataran sintaktik, standar operasional prosedur pemeriksaan reguler pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan suatu tindakan dalam pengawasan internal pada tataran pemerintahan provinsi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat provinsi mempunyai fungsi untuk merencanakan program pengawasan, perumusan kebijakan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam tugas pengawasan serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan peralatan pemerintah provinsi.

Inspektorat provinsi menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan program-program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD). Dari segi fungsi-fungsi manajemen, inspektorat provinsi mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi perencanaan. Konsisten dengan konsep pengawasan, Henry Fayol dalam bukunya “General and Industrial Administration” menyatakan pengawasan terdiri atas

tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan (Subroto, 2009). Pelaksanaan pengawasan yang efektif merupakan salah satu refleksi dari efektivitas seorang pemimpin. Konsisten dengan stewardship theory (Donaldson and Davis, 1991) yang mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok yang pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu dalam kelompok organisasi. Tentunya setiap pemimpin selalu menginginkan agar baginya tersedia suatu sistem informasi yang andal agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya benar-benar terlaksana sesuai dengan hal-hal yang telah ditetapkan dalam rencana. Informasi yang spesifik disediakan untuk kepentingan pengawasanlah yang akan lebih bermanfaat dalam usaha meningkatkan seluruh kegiatan pengawasan yang akan dijalankan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sebagai pengawas internal dilingkungan Provinsi Sulawesi Barat memiliki kepentingan untuk menyampaikan suatu informasi terhadap pengguna. Simbol atau tanda pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam kegiatan pengawasan bisa didapatkan dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler. Pada tataran sintaktika, untuk menciptakan pengawasan yang baik Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat telah merancang prosedur pengawasan yang terstruktur dan telah tertuang dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler

pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang suatu tindakan dalam pelaksanaan pengawasan internal pada tataran pemerintah provinsi. Inspektorat tidak lain menekankan pada perencanaan program pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta pertanggungjawaban hasil pengawasan.

2. Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Provinsi dari Aspek Semantika

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat provinsi/kota. Inspektorat sebagai APIP di provinsi dituntut memainkan peran untuk mengontrol dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Inspektorat merupakan lembaga perangkat provinsi yang mempunyai tugas membantu kepala pemerintahan (gubernur) dalam menyelenggarakan pemerintahan provinsi dibidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintahan, yang secara organisator dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada kepala pemerintahan (gubernur). Pada implementasi dari pengawasan internal, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selain melakukan pengawasan khusus juga melakukan pengawasan berkala yang dilaksanakan setiap tahun terhadap semua satuan kerja perangkat provinsi mulai dari dinas, badan, kecamatan sampai kelurahan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut merupakan kewajiban bagi setiap instansi dan terkhusus Inspektorat provinsi sebagai APIP, maka jika dalam Islam hukumnya sudah jelas kalau dilaksanakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan mendapat siksa atau sanksi. Sesuai dalam QS. Al-Anfal/8: 27, disebutkan:

وَأَنْتُمْ أَمَانَاتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهَ تَخُونُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S Al-Anfaal/8:27)

Kandungan pada ayat diatas menurut tafsir Jalalayn (tafsir Al-Qur'an yang disusun oleh Jalaluddin al-Mahalli pada tahun 1459 dan dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin as-Suyuthi pada tahun 1505) ialah bagi orang-orang yang beriman janganlah kalian mengkhianati Allah dan rasul-Nya dan jangan pula kalian mengkhianati amanat-amanat kalian yakni apa-apa yang dipercayakan kepada kalian berupa agama dan hal-hal yang lain sedangkan kalian mengetahui. Kemudian dijelaskan pula mengenai amanah dalam QS. Al-Mu'minun/23: 8, disebutkan:

رَاعُونَ وَعَهْدِهِمْ لِأَمَانَاتِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ

Terjemahan:

(Dan) orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. (Q.S Al-Mu'minun/23:8)

Berdasarkan kandungan pada ayat diatas menurut tafsir Al-Misbah bahwa orang-orang mukmin selalu menjaga apa saja yang diamanatkan kepadanya, baik harta, perkataan (pesan) atau perbuatan dan sebagainya. Juga selalu menepati janji mereka kepada Allah dan janji antara sesama mereka. Mereka tidak mengkhianati amanat dan juga tidak melanggar janji. Berangkat dari dua ayat tersebut, maka kunci sukses untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan baik berdasarkan kepegawaian maupun kebijakan internal dan terlebih lagi kita sebagai muslim adalah mengakui dan menerima tugas serta jabatan tersebut sebagai amanah dan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut harus tumaninah. Setiap posisi tersebut juga sudah diatur persyaratan dan tanggungjawabnya sehingga dapat lebih tertib dan teratur dalam pembagiannya. Kondisi ini kita susun bersama agar mendapat amanah untuk bertugas dan berfungsi dengan baik. Pada tataran semantika membahas tentang kegiatan atau realisasi fisis yang menjadi simbol-simbol pada standar operasional prosedur pemeriksaan reguler. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan. Maka dari itu, Inspektorat provinsi selain mengetahui tugas dan fungsinya, juga harus menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analisis semiotika pada tataran semantika pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut:

a) Analisis Semantika pada Simbol Fisik Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Reguler

Simbol dalam bidang akuntansi memiliki makna sangat mendalam. Kebanyakan orang ketika mendengar simbol dalam akuntansi, akan menuntun kepada sebatas angka dan kata saja. Analisis semantika dalam semiotika berguna untuk menuntun para pembaca bahwa yang termasuk simbol, bukan sekedar itu saja melainkan bisa berupa sesuatu seperti dokumen atau laporan. Simbol fisik pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat pada standar operasional prosedur pemeriksaan berupa output yang dihasilkan dalam proses pengawasan yaitu: nota dinas; surat tugas; program kerja pemerintahan (PKP); hasil klarifikasi/rekonsiliasi; bukti-bukti pendukung;; naskah hasil pemeriksaan (NHP); serta laporan hasil pemeriksaan (LHP). Pada dasarnya output tersebut dimasukkan sebagai bagian dari simbol karena merupakan salah satu bagian dari proses pengawasan yang dijadikan sebagai penilaian.

b) Analisis Semantika pada simbol Kata pada Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Reguler

Selain simbol berupa fisik, aspek kata juga tertuang dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Adapun penyimbolan (analisis semantika) adalah sebagai berikut:

1) Proses Persiapan dan Perencanaan

Dalam melakukan suatu pengawasan terlebih dahulu Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat membuat perencanaan dan persiapan pemeriksaan. Inspektur provinsi mengeluarkan nota dinas kepada Irbanwil untuk membuat usulan rencana pemeriksaan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan. Kemudian irbanwil dan kasubag program membuat usulan rencana pemeriksaan. Usulan tersebut kemudian dievaluasi dan jika telah disepakati maka dibuatlah surat tugas yang kemudian ditandatangani oleh Gubernur selaku kepala pemerintahan dan menyerahkan kepada tim pemeriksa Inspektorat.

2) Pelaksanaan Penugasan dan Pemeriksaan

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, melakukan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan sasaran pemeriksaan yang ditetapkan dan harus mencatat semua kejadian yang ditemukan dalam kegiatan pemeriksaan dan lebih fokus terhadap pengumpulan data, bukti, maupun proses kegiatan yang dianggap tidak relevan. Jika didapatkan perbedaan data, pihak pemeriksa harus melakukan klarifikasi/rekonsiliasi dengan pihak atau sumber yang lebih terpercaya dan berkompeten. Juga dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan diluar sasaran pemeriksaan yang telah ditetapkan, pihak Inspektorat melaporkan kepada Inspektur sebagai pertimbangan dilakukannya pemeriksaan sendiri (Pemeriksaan Khusus). Setelah kegiatan pemeriksaan selesai, pihak Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat mengadakan pertemuan dengan pimpinan instansi/SKPD untuk

memberikan catatan-catatan lain yang berguna bagi entitas pemeriksaan. Secara rinci kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam kegiatan pemeriksaan akan dikirimkan dalam bentuk Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).

3) Pelaporan Hasil Penugasan

Kegiatan akhir proses pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ialah laporan hasil penugasan. Tim pemeriksa mereview KKP sekaligus melampirkan semua berkas hasil pemeriksaan. Kemudian temuan sementara dituangkan dalam naskah hasil pemeriksaan yang diserahkan ke pengendali teknis untuk direview dan ditandatangani. Selanjutnya memberikan NHP tersebut kepada pimpinan instansi/SKPD, kemudian dari hasil tanggapan NHP tersebut tim pemeriksa melakukan penilaian sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya menerapkan pelaksanaan pengawasan internal kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerja, memikirkan dan mengemban tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Adapun dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ialah dalam rangka pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, agar arah dan sasaran pelaksanaan otonomi provinsi dapat terwujud sebagaimana mestinya. Untuk melakukan pengawasan yang

baik maka perlu adanya standar operasional pemeriksaan. Suatu standar dapat berjalan dengan baik, jika aparatur pemerintah amanah dalam menjalankannya. Artinya bersikap jujur dan dapat diandalkan dalam menjalankan komitmen, tugas, dan kewajiban. Kejujuran adalah kehati-hatian diri seseorang dalam memegang amanah yang telah dipercayakan oleh orang lain kepada dirinya. Karena itu, kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran, termasuk di dalamnya kemampuan mendengarkan, sebagaimana kemampuan berbicara, serta setiap perilaku yang bisa muncul dari tindakan manusia (Kesuma, 2011). Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Provinsi:

“Iya kita sudah lakukan yaitu bagaimana bentuk implementasinya di lapangan, dengan melakukan berbagai deteksi dini sejak awal dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan. Bahkan kita melakukan kerja sama dengan kejaksaan, polda, dan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Intinya kita harus memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan itu berjalan dengan baik.”

Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah:

“Menurut saya, pelaksanaan pengawasan dalam hal pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, temuan yang ditemukan di lapangan kita bandingkan dengan data yang sudah ada sehingga jika mengalami ketidakcocokan barulah kami menindaklanjuti. Yah ini tentu tidak terlepas dari fungsi kami dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Semua hal yang kami lakukan sebagai aparat pengawas intern pemerintah tidak lepas dari fungsi yang seharusnya.”

Lebih lanjut beliau menjelaskan mengenai proses pelaksanaan pengawasan:

“Langkah-langkahnya itu pertama Membuat PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), yang tersusun dari agenda-agenda yang akan dilaksanakan seperti kegiatan komprehensif, pembinaan, berbagai reviu, maupun tugas-tugas lain yang dimandatkan oleh pusat. Setelah itu, draft PKPT dibagikan kepada para inspektur pembantu wilayah untuk dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPT. Melaksanakan tugas pemeriksaan yang dilanjutkan dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan untuk diteruskan kepada Gubernur.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat mengemban tugas yang sangat penting dalam mengawas dan mengawal jalannya pemerintahan di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat. Inspektorat dalam hal ini mengedepankan tujuan pemerintahan. Sesuai dengan teori stewardship adalah suatu keadaan dimana manajer sebagai steward lebih berfokus pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi bukan pada keinginan pribadi (Donaldson and davis, 1991). Pengawasan yang dilakukan oleh tim pemeriksa tidak lepas dari peran manajemen yang ada pada suatu organisasi. Dukungan tersebut dilakukan untuk efektivitas pengawasan yang dilakukan dalam hal pemeriksaan agar berjalan dengan baik, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari organisasi. Terkait dengan segi semantik ini dapat disimpulkan beberapa sebagai berikut.

Analisis semantika membahas tentang kegiatan atau realisasi fisis yang menjadi simbol-simbol pada standar operasional prosedur pemeriksaan reguler. Pada sisi semantika ini terdapat dua bagian yaitu Simbol fisik pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat pada standar operasional prosedur

pemeriksaan berupa output yang dihasilkan dalam proses pengawasan, yaitu: nota dinas; surat tugas; program kerja pemerintahan (PKP); naskah hasil pemeriksaan (NHP); serta laporan hasil pemeriksaan (LHP). Selain simbol berupa fisik, aspek kata juga tertuang dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Adapun penyimbolan (analisis semantika) yaitu proses persiapan dan perencanaan; pelaksanaan penugasan dan pemeriksaan; serta pelaporan hasil penugasan

3. Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dari Aspek Pragmatika

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah perencanaan telah dilaksanakan sebagai pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan seharusnya terjadi. Keberhasilan pemerintah provinsi di semua tingkatan menjadi cerminan bagaimana tampilan pemerintahan di Indonesia. Inilah mengapa perlu adanya aparat pengawas internal pemerintah di provinsi atau dikenal Inspektorat provinsi. Inspektorat provinsi menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas dan pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah provinsi yang tertata dan tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja provinsi (APBD). Untuk menjamin dan menilai sebuah mutu di perlukan sebuah independensi yang kuat, untuk itu organisasi pengawasan harus di berikan independensi yang menyeluruh agar dalam pelaksanaan tugas pengawasannya dapat memberikan keyakinan yang objektif.

Aparatur inspektorat juga harus memiliki sikap profesionalisme agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Profesionalisme ialah perilaku bertanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang terhadap apa yang telah dikerjakan. Pengawasan sebagai salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan pemerintahan provinsi yang baik dan bersih, harus dilaksanakan secara profesional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Penafsiran aparatur pemerintah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat atas standar operasional prosedur pemeriksaan reguler pada tataran sintaktik dan semantik merupakan faktor yang melandasi persepsi aparatur tentang manfaat prosedur pemeriksaan pada tataran pragmatik. Prosedur yang disusun sebisa mungkin tidak bias dalam informasinya, artinya prosedur tersebut dapat dipahami oleh para pemeriksa dalam pengawasan tersebut. Analisis pragmatik pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa prosedur yang disusun sangat memberikan manfaat bagi para pengguna. Pemahaman para aparatur khususnya tim pemeriksa dalam menilai setiap prosedur yang ada dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler menjadi suatu indikator dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Keberhasilan tersebut juga didukung dengan hasil LKPD (laporan keuangan pemerintah provinsi) yang telah memperoleh opini wajar dengan pengecualian setelah sebelumnya mendapat opini disclaimer. Pelaksanaan pengawasan secara tepat yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, juga memiliki andil dalam opini audit tersebut. Adanya simbol yang tepat yang diterapkan kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi

Barat juga menjadi pendukung baiknya suatu pengawasan internal. Berdasarkan hasil wawancara dengan inspektur inspektorat Provinsi Sulawesi Barat:

‘Iya kita sudah lakukan yaitu bagaimana bentuk implementasinya di lapangan, dengan melakukan berbagai deteksi dini sejak awal dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan. Bahkan kita melakukan kerja sama dengan kejaksaan, polda, dan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Intinya kita harus memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan itu berjalan dengan baik.’

Lebih lanjut, beliau menjelaskan terkait dengan SOP yang digunakan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat:

“Kita menggunakan berbagai standar yang sudah ada, baik itu standar yang dikeluarkan oleh instansi-instansi profesi maupun standar-standar pemeriksaan yang umum kita gunakan. Ukuran profesionalisme ini diukur berdasarkan seberapa patuh pelaksanaan standar yang kita gunakan. Semua SOP ini tentunya demi mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.”

Sejalan dengan teori stewardship menjelaskan bahwa para pemimpin lebih memfokuskan pada kesuksesan organisasi yang menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok yang pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu dalam kelompok organisasi. Publik tidak lain mengharapkan bahwa Inspektorat provinsi mampu mengeksekusi berbagai laporan atau temuan, persepsi ini muncul karena tindakan yang dilakukan selanjutnya harus berdasarkan keputusan kepala provinsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan inspektur inspektorat Provinsi Sulawesi Barat:

“Ya, setiap pengawasan itu pasti selalu ada temuan, karena pengawasan membandingkan hasil di lapangan dengan perencanaan atau antara standar dengan apa yang dilakukan di lapangan. Inilah yang disebut gap. Nah kalo memang ada yang demikian, pasti kita berikan punishment sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan sampe pada tahap pemecatan atau pelengseran

jabatan. Itu juga berlaku untuk semua jenjang karir seperti kenaikan pangkat atau promosi apabila terkait dengan hal tersebut.”

Temuan yang ada dalam setiap pengawasan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan sebuah bukti bahwa penyimpangan masih ada hingga hari ini. Pada dasarnya, tindakan meminimalisir adalah tindakan yang paling masuk akal mengingat banyaknya kendala yang ditemui saat terjun ke lapangan. Salah seorang Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan;

“Ada beberapa kendala, misalnya kecukupan waktu, kecukupan anggaran, kecukupan pelatihan. Seperti itu saya rasa kendalanya. Nah kalo misalnya kendalanya sudah muncul kita harus bersikap lebih baik lagi terkait dengan kemungkinan perubahan-perubahan perilaku dari objek yang kita awasi atau periksa. Seperti itu.”

Beliau kemudian menambahkan alasan mengapa hal tersebut harus dilakukan;

“Tentunya karena kita paham tujuan pengawasan itu sendiri untuk menghindari dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi terhadap pelaksanaan program-program pemerintahan baik dalam tingkatan SKPD, Provinsi, kecamatan, kelurahan maupun desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, tindakan pengawasan Inspektorat terhadap adanya bukti dan fakta yang ditemukan di lapangan secara garis besar dapat diklasifikasikan pada dua hal pokok tindakan hukum yang ditempuh oleh pihak Inspektorat. Apabila hasil temuan itu terindikasi perbuatan yang melawan hukum dan tidak bisa lagi diperbaiki dan dibina, maka masalah tersebut atas pertimbangan pimpinan diteruskan kepada pihak penegak hukum untuk diproses dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan apabila hasil temuan itu terindikasi penyimpangan prosedur atau pelanggaran yang

bersifat administratif, maka oleh Inspektorat merekomendasikan kepemimpinan untuk ditegur yang bersangkutan secara tertulis ataukah diberikan sanksi sesuai ketentuan (Safwan dkk., 2019).

Analisis pragmatika pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa prosedur yang disusun sangat memberikan manfaat bagi para pengguna. Prosedur yang disusun sebisa mungkin tidak bias dalam informasinya. Pemahaman para aparatur khususnya tim pemeriksa dalam menilai setiap prosedur yang ada dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler menjadi suatu indikator dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi. Keberhasilan tersebut juga didukung dengan hasil LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) yang telah memperoleh opini wajar dengan pengecualian setelah sebelumnya mendapat opini disclaimer. Pelaksanaan pengawasan secara tepat yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, memiliki andil dalam opini audit tersebut karena adanya simbol yang tepat yang diterapkan menjadi salah satu pendukung baiknya suatu pengawasan internal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis semiotika pada tataran sintaktika, dimana Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sebagai pengawas internal dilingkungan Provinsi Sulawesi Barat memiliki kepentingan untuk menyampaikan suatu informasi terhadap pengguna. Simbol atau tanda pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam kegiatan pengawasan bisa didapatkan dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler.
2. Analisis semiotika pada tataran semantika pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan hasil penelitian di lapangan terbagi dalam dua simbol yaitu pada simbol fisik dan kata. Simbol fisik pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat pada standar operasional prosedur pemeriksaan berupa output yang dihasilkan dalam proses pengawasan, yaitu: nota dinas; surat tugas; program kerja pemerintahan (PKP); naskah hasil pemeriksaan (NHP); serta laporan hasil pemeriksaan (LHP).
3. Analisis semiotika pada tataran pragmatika Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa prosedur yang disusun sangat memberikan manfaat bagi para pengguna. Prosedur yang disusun sebisa mungkin tidak bias dalam informasinya. Pemahaman para aparatur khususnya tim

pemeriksa dalam menilai setiap prosedur yang ada dalam standar operasional prosedur pemeriksaan reguler menjadi suatu indikator dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

B. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Meskipun penelitian ini dapat diselesaikan secara tepat waktu, namun tetap saja ada keterbatasan yang didapatkan dalam prosesnya. Keterbatasan untuk peneliti selanjutnya antara lain:

1. Terdapat beberapa data dan informasi yang tidak berhasil dihimpun oleh peneliti, sehingga hasil penelitian menjadi kurang maksimal.
2. Waktu wawancara yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh kesibukan informan dalam penelitian jelang akhir tahun, di mana kegiatan pemeriksaan rutin yang mulai dilakukan. Selain itu, situasi pandemi *covid-19* juga menjadi alasan utama dibatasinya waktu bagi peneliti untuk melakukan wawancara dan pengambilan data-data yang dibutuhkan.

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya agar sekiranya tulisan ini dapat dijadikan referensi. Peneliti juga berharap agar peneliti selanjutnya dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat provinsi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak dilakukan jelang pemeriksaan rutin yang dilakukan untuk menghindari keterbatasan wawancara agar

peneliti bisa mengkaji lebih dalam dan mengkonfirmasi hal yang terkait dengan penelitian. Kita juga berharap bahwa pandemi segera mereda.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya.

Abdul, Rifqi., S. Rahayu, dan D. N. Triyanto. 2016. Pengaruh Etika, Kompetensi, dan Independensi terhadap Kualitas Audit. *e-Proceeding of Management*, 3(3): 3241-3248.

Adawiyah, Salimatul dan Nur Diana. 2018. Kajian Semiotik Laporan Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Sebelum dan Sesudah menjadi Pemenang Annual Report Award (ARA 2014). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(2): 97-105.

Agustina, Lidya. 2009. Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor. *Jurnal Akuntansi*, 1(1): 40-69.

Amir, M. Taufik. 2011. *Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.

Ardika, I. K. dan N. N. S. Ekayani. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2007-2011. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (JINAH)*, 3(1).

Ardiyanti, M. T., M. Djasli, dan G. A. Harwida. 2016. Peran Inspektorat Provinsi Smenep dalam Pengawasan Pengadaan Barang Milik Provinsi. *Jurnal PAMATOR*, 9(1): 1-7.

Arief, I. S., M. Suun, dan A. Djunaid. 2018. Pengaruh Kedudukan Kelembagaan, Ambiguitas Peran dan Konflik Peran terhadap Independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Budaya Lokal sebagai Variabel Moderating. *Journal of Management and Business*, 1(2): 128-155.

Arif, Muhammad. 2018. Implementasi Pakta Integritas Auditor Inspektorat dalam Meningkatkan Kinerja Pengawasan Pemerintahan Provinsi Takalar. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(1): 1-10.

Belkaoui, Ahmed R. 2006. *Teori Akuntansi*. Cambridge : The University Press.

Bungin, H. M. Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Pertama Cetakan Ketiga*. Jakarta: Kencana.

- Byusi, Hafid dan Fatchan Achyani. 2017. Determinan Opini Audit Going Concern (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1): 13-28.
- Donaldson, L, dan Davis J. H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16.
- Fitriani, Indah dan Yuga Luthfi Hidayat. 2013. Pengaruh Objektivitas dan Integritas Auditor Internal terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1 (1): 61-72.
- Hamzah, N., A. Mattulada, dan M. Ikbali. 2018. Pengaruh Hasil Pengawasan Internal dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap Kinerja Keuangan SKPD Di Provinsi Tojo Una-Una. *E-Journal Katalogis*, 6(2): 41-52.
- Hanafi, Wahyu. 2017. Semiotika Al-Quran: Representasi Makna Verba Reflektif Perilaku Manusia dalam Surat Al-Maun dan Bias Sosial Keagamaan. *Dialogia*, 15(1): 1-22.
- Haris, Abdul dan Heri Kusmanto. 2016. Fungsi Pengawasan Inspektorat Provinsi Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1): 75-86.
- Harmawan, W., R. Yunus, dan A. Murfhi. 2012. Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Provinsi Pangkajene dan Kepulauan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1): 47-54.
- Haryanto, N. O. dan C. Susilawati. 2018. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1): 42-55.
- Huong, T. T. 2018. Factors Affecting the Effectiveness: an Ethiopian Public Sector Study. *Managerial Auditing Journal*, 22(5): 470-484.
- Jesika, M. L., R. P. Simanjuntak, dan S. Sihombing. 2015. Independensi dan Tanggung Jawab Auditor dan Pengaruhnya terhadap Opini Auditor. *Jurnal Ilmiah*, 19(3): 1-10.
- Juwita, Rukmi. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan keuangan. *Jurnal Trikonomika*, 12(2): 201-214.
- Kesuma, Darma., dkk. 2011. *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung. Rosda Karya.

- Kriyantono, R. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, D. S. A., Nadirsyah, dan S. Abdullah. 2017. Pengaruh Independensi Auditor, Etika Profesi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor di BPK Perwakilan Provinsi Aceh. *Jurnal Megister Akuntansi*, 6(3): 49-57.
- Littlejohn, S. W. 2009. *Theories of Human Communication (Edisi 9)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lusiana., A. Djamhuri, dan Y. W. Prihatiningtias. 2017. Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. *Jurnal Economia*, 13(2): 171-190.
- Mahanani, Setyo. 2018. Kualitas Pengawasan Keuangan Provinsi di Inspektorat Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Among Makarti*, 11(21): 70-83.
- Manialup, A. W., G. B. Nangoi, dan J. Morasa. 2017. Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 8(2): 20-29.
- Marlaini., Aliamin, dan M. Indriani. 2018. Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Paradigma Baru. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1): 95-108.
- Mifti, Sri., N. B. Lestariyo, dan A. Kowanda. 2009. Pengawasan Internal dan Kinerja. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 3(14): 1-11.
- Mihret, D. G. dan A. W. Yismaw. 2007. Internal Audit Effectiveness: an Ethiopian Public Sector Study. *Managerial Auditing Journal*, 22(5): 470-484.
- Muis, Muhammad Amirul Haq. 2014. Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2): 73-82.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Buku 1 Jilid ke 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Mutiawanthi. 2017. Tantangan Role / Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(2): 104-114.
- Neuman. W. Lawrence. 2010. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allynand Bacon.
- Novriyansah, A., N. Kurniah, dan A. Suprpti. 2017. Studi tentang Perkembangan Karakter Jujur pada Anak Usia Dini. *Jurnal Potensia*, 2(1): 14-22.

- Nurmayani, T. H. dan E. Deviani. 2018. Peran Inspektorat Provinsi sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara*, 5(1): 1-11.
- Oktaviani., Rusliyawati, dan E. Heniwati. 2017. Analisis Atas Annual Report PT Timah Tbk: Studi Interpretive dalam Perspektif Semiotika dan Retorika. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(2): 139-160.
- Rante, I., A. Salle, dan E. R. Marlissa. 2018. Analisis Terhadap Pemberian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Provinsi Pegunungan Bintang. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Provinsi*, 3(2): 1-12.
- Riduwan, Akhmad. 2010. *Semiotika Laba Akuntansi: Studi Kritisal-Posmodernis Derridean*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Risambessy, Richard Izaac. 2009. Analisis Manajemen Aset Provinsi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Provinsi di Provinsi Lamongan (Studi tentang Aset Tetap Berwujud Objek Wisata Provinsi). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 6(1): 183-242.
- Rofingatun, Siti. 2018. Pengaruh Independensi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Provinsi*, 13(2): 90-104.
- Salahuddin, A. dan A. Irwanto. 2013. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: CV Pustaka Setia.
- Setianto, H. 2004. *Standar Profesi Audit Internal*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit.
- Setiawan, H. dan T. S. Putro. 2013. Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam pengawasan Keuangan Provinsi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4 (2): 119-218.
- Shihab, Quraissy. 2011. *Kitab Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Al-Mizan Press.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sihite, Renny Novsellia dan Holiawati. 2017. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, SPI dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(2): 81-92.
- Sirajuddin, Betri dan Ade Riza Oktaviani. Integritas Auditor sebagai Pemoderasi: Pengaruh Kompetensi, Independensi, Kompleksitas Tugas dan Audit Time Budget terhadap Kualitas Audit. *Journal Balance*, 15(1): 90-110.

- Sudiran dan Ahmad Jubaidi. 2018. Tinjauan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Berdasarkan Internal Audit Capability Model untuk Mewujudkan Peran yang Efektif di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1): 1-15.
- Susilo, Pria Andono dan Tri Widyastuti. 2015. Integritas, Objektivitas, Profesionalisme Auditor dan Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Jakarta Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, 2(1): 65-77.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan* (Edisi 3). Yogyakarta: BPFE.
- Suwita, M. K. dan S. G. Arnan. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 1(2): 289-296.
- Syafrizal, S. H., N. Mawaddah, dan E. Zulfar. 2018. Kualitas Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam Pengawasan Keuangan Provinsi Di Kota Lhokseumawe. *Proceeding*, 2(1): 25-29.
- Trisnawati, N., W. Banga, dan S. Alam. 2018. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Provinsi di Provinsi Konawe. *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 9(2): 51-60.
- Umar, Zulkifli., C. F. Syawalina, dan Khairunnisa. 2018. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Provinsi terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. *Jurnal Kolegial*, 6(2): 136-148.
- Wulandari, S. G. dan D. G. D. Suputra. 2018. Pengaruh Profesionalisme Auditor, Komitmen Organisasi dan Etika Profesi pada Kinerja Auditor KAP Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1): 273-300.
- Yaumi, Muhammad. 2014. *Pendidikan Karakter: Landasan, pilar dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yusuf, Muhammad. 2014. Pengaruh Kompetensi, Objektivitas dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor. *Jurnal Akuntansi*, 2(3): 1-29.

LAMPIRAN 1
MANUSKRIP WAWANCARA

Nama : SURYADI, SE, QIA

Jabatan : Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai fungsi Inspektorat Provinsi?

Di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari *Three Line of Defense*. Pertama, manajemen. Kita harus bisa memastikan bahwa manajemen seperti dinas-dinas itu dengan memberikan mereka ruang-ruang konsultasi jika mereka punya keraguan atau ketidaktahuan terhadap akuntabilitas dari kegiatan yang mereka lakukan. Kedua, dibagian kepemimpinan atau dalam hal ini kepala-kepala dinas atau kepala bidang. Ketiga, ketika kedua pertahanan tadi masih bisa ditembus nah barulah di situ auditor inspektorat beraksi. Jadi peranan Inspektorat di sini adalah memastikan bahwa *quality assurance* dapat tercapai. Di sini kita memainkan peranan deteksi terhadap segala bentuk resiko dari penyalahgunaan pemerintahan.

2. Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan semiotika, salah satu sisinya ialah sintaktik, dimana secara garis besar bahwa sintaktika ini merupakan pemaknaan simbol dari fungsi inspektorat dalam hal pengawasan. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pengawasan internal Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat?

Kita cukup diperankan, jadi pemerintah di Sulawesi Barat itu berharap banyak kepada inspektorat ini agar bisa mengawal jalannya pemerintahan, sehingga setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus diadakan reviu oleh inspektorat guna memastikan hal tersebut sesuai dengan segala prosdural yang ada.

3. Kemudian sisi semantik merupakan penekanan yang dilakukan pada pembahasan masalah penyimbolan pada realitas ke dalam tanda-tanda sehingga orang dapat membayangkan kegiatan fisis yang dilakukan

instansi. Bagaimana pandangan Bapak, apakah inspektorat telah melakukan fungsinya jika dilihat dari sisi semantik?

Iya kita sudah lakukan yaitu bagaimana bentuk implementasinya di lapangan, dengan melakukan berbagai deteksi dini sejak awal dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan. Bahkan kita melakukan kerja sama dengan kejaksaan, polda, dan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Intinya kita harus memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan itu berjalan dengan baik.

4. Bagaimana kemudian tindakan yang dilakukan inspektorat mengenai standar operasional pemeriksaan?

Kita menggunakan berbagai standar yang sudah ada, baik itu standar yang dikeluarkan oleh instansi-instansi profesi maupun standar-standar pemeriksaan yang umum kita gunakan. Ukuran profesionalisme ini diukur berdasarkan seberapa patuh pelaksanaan standar yang kita gunakan. Semua SOP ini tentunya demi mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

5. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan Inspektorat provinsi kepada instansi pemerintahan pasti ada permasalahan yang terjadi. Bagaimana kemudian sanksi yang diberikan Inspektorat daerah terkait hal tersebut?

Ya, setiap pengawasan itu pasti selalu ada temuan, karena pengawasan membandingkan hasil di lapangan dengan perencanaan atau antara standar dengan apa yang dilakukan di lapangan. Inilah yang disebut gap. Nah kalo memang ada yang demikian, pasti kita berikan punishment sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan sampe pada tahap pemecatan atau pelengseran jabatan. Itu juga berlaku untuk semua jenjang karir seperti kenaikan pangkat atau promosi apabila terkait dengan hal tersebut.

MANUSKRIP WAWANCARA

Nama : Drs. GUSTAM KAMASE, M.Si

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai fungsi Inspektorat provinsi?

Fungsi inspektorat provinsi sesuai dengan surat keputusan Gubernur adalah badan pengawasan internal yang berperan sebagai pembina dan pengawas terhadap seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan di Sulawesi Barat. Selain itu inspektorat provinsi ini juga berperan sebagai lembaga penjamin mutu (quality assurance) terhadap semua SKPD agar semua kegiatan-kegiatan dapat dilakukan sesuai aturan. Di sini kami juga lebih berperan untuk mencegah atau meminimalisir berbagai penyimpangan.

2. Bagaimana pandangan Bapak mengenai tujuan pengawasan?

Tujuan pengawasan itu adalah agar kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kemudian sisi semantik merupakan penekanan yang dilakukan pada pembahasan masalah penyimbolan pada realitas ke dalam tanda-tanda sehingga orang dapat membayangkan kegiatan fisis yang dilakukan instansi. Bagaimana pandangan Bapak, apakah inspektorat telah melakukan fungsinya jika dilihat dari sisi semantik?

Ya, karena ini inspektorat memang fungsinya sebagai pengawasan internal. Menurut saya, pelaksanaan pengawasan dalam hal pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, temuan yang ditemukan dilapangan kita bandingkan dengan data yang sudah ada sehingga jika mengalami ketidakcocokan barulah kami menindaklanjuti. Yah ini tentu tidak terlepas dari fungsi kami dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Semua hal yang kami lakukan sebagai aparat pengawas intern pemerintah tidak lepas dari fungsi yang seharusnya.

4. Bagaimana kemudian langkah Inspektorat daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal?

Langkah-langkahnya itu:

- a. **Membuat PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), yang tersusun dari agenda-agenda yang akan dilaksanakan seperti kegiatan komprehensif, pembinaan, berbagai revidu, maupun tugas-tugas lain yang dimandatkan oleh pusat.**
- b. **Setelah itu, draft PKPT dibagikan kepada para inspektur pembantu wilayah untuk dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPT.**
- c. **Melaksanakan tugas pemeriksaan yang dilanjutkan dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan untuk diteruskan kepada Gubernur.**



MANUSKRIP WAWANCARA

Nama : Aswandi Ahmad.

Jabatan : Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat

1. Selama melakukan pemeriksaan, apakah ada kendala yang ditemukan?

Ada beberapa kendala, misalnya kecukupan waktu, kecukupan anggaran, kecukupan pelatihan. Seperti itu saya rasa kendalanya.

2. Apa tindakan yang Bapak/Ibu lakukan sebagai pemeriksa (PFA Inspektorat) terkait dengan kendala tersebut?

Tentunya tujuan pengawasan itu sendiri untuk menghindari dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi terhadap pelaksanaan program-program pemerintahan baik dalam tingkatan SKPD, Provinsi, kecamatan, kelurahan maupun desa

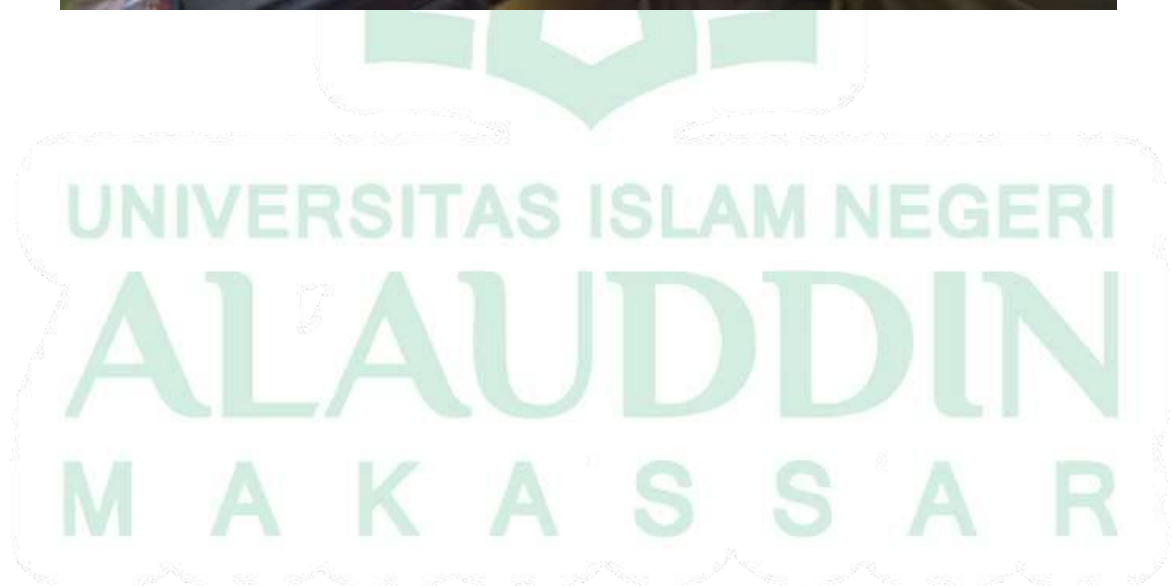
3. Pragmatika merupakan reaksi yang muncul dari pihak yang dituju atau terkait dengan perubahan perilaku terhadap informasi. Bagaimana bapak/Ibu melihat hal tersebut?

Nah kalo misalnya kendalanya sudah muncul kita harus bersikap lebih baik lagi terkait dengan kemungkinan perubahan-perubahan perilaku dari objek yang kita awasi atau periksa. Seperti itu. Karena kita paham tujuan pengawasan itu sendiri untuk menghindari dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi terhadap pelaksanaan program-program pemerintahan baik dalam tingkatan SKPD, Provinsi, kecamatan, kelurahan maupun desa.

LAMPIRAN II
DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Indra Saridewi Rahmat, dilahirkan di Kota Mamuju pada tanggal 27 Juli 1998.

Penulis merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan M Rahmat dan Subaedah.

Penulis memulai jenjang pendidikan formal di SDN

Balatedong lulus pada Tahun 2010, SMP Negeri 1 Kalukku lulus pada tahun 2013, SMA Negeri 1 Kalukku dan lulus pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan studi di jenjang SMA, penulis kemudian melanjutkan Pendidikan pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016 dan berhasil menyelesaikan studi sarjana (S1)-nya pada tahun 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R